

**LAPORAN**  
**STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**  
**KABUPATEN BLORA**  
**TAHUN 2007**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**JAWA TIMUR**  
**TAHUN 2007**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I. TUJUAN**

Tujuan umum dari penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang potensi dan kondisi lingkungan di Kabupaten Blora.

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dari Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ini adalah :

- a. Menyediakan data dan informasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik.
- c. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan, sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

**II. VISI DAN MISI**

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006–2010 mengembang Visi Kabupaten Blora yaitu terwujudnya masyarakat Blora yang maju dan sejahtera dengan didukung oleh manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia dalam lingkungan yang berkeadilan, damai dan demokratis.

Misi merupakan upaya untuk mencapai visi Kabupaten Blora, dengan

cara :

- a. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Blora yang maju dan sejahtera, berdaya saing, sehat dan berpendidikan memadai dalam kehidupan ekonomi yang berkualitas (mewujudkan masyarakat Kabupaten Blora yang *Wareg, Waras* dan *Wasis*).
- b. Mewujudkan kehidupan sosial politik masyarakat Kabupaten Blora yang demokratis, aman, tertib, damai serta menghormati penegakan hukum kesetaraan dan hak asasi manusia (mewujudkan masyarakat Kabupaten Blora yang *Wilujeng*).
- c. Mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam kerangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

### III. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Blora terletak di antara 111° 16' sampai dengan 111° 338' Bujur Timur dan di antara 6° 528' sampai dengan 7 °248' Lintang Selatan, berada pada 25 meter hingga 500 meter di atas permukaan laut, yang diapit oleh jajaran Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan. Susunantarai di Kabupaten Blora terdiri atas 56% tanah *gromsol*, 39% *mediteran* dan 5% *aluvial*. Secara administratif terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Ngawi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban Provinsi Jawa Timur.

Luas Kabupaten Blora yang terbagi menjadi 16 Kecamatan adalah 182.058,797 hektar atau 5,59% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan peruntukannya, lahan sawah sebesar 24,78% (46.115,266 ha), bangunan/pemukiman seluas 9,04% (16.815,673 ha), tanah tegalan seluas 14,12% (26.267,235 ha), waduk 0,03% (56,962 ha), hutan seluas 48,59% (90.416,250 ha) dan peruntukan lainnya sebesar 0,44% (3,43 ha). Berdasarkan

data tersebut wilayah Kabupaten Blora didominasi oleh wilayah hutan yang hampir mencapai separuh. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki, namun dapat menjadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik.

Jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2006 sebesar 844.490 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 0,23%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, Tahun 2006

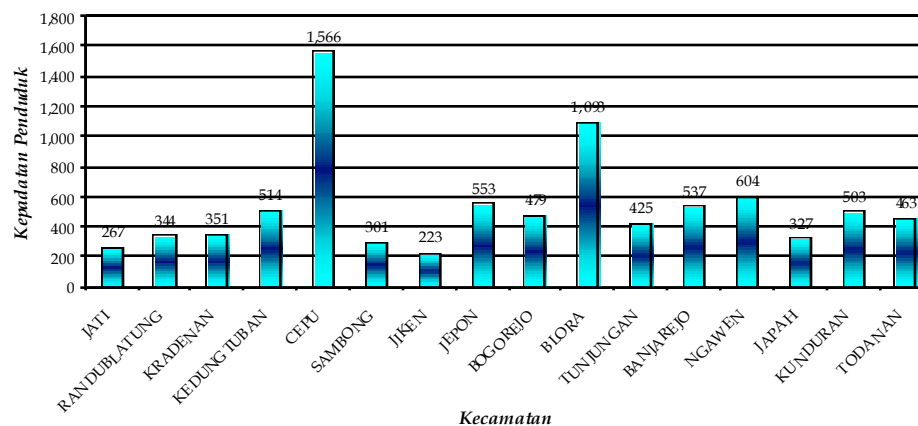
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Jati	49.091
2	Randublatung	72.635
3	Kradenan	38.385
4	Kedungtuban	54.942
5	Cepu	76.972
6	Sambong	26.724
7	Jiken	37.496
8	Bogorejo	23.878
9	Jepon	59.618
10	Blora	87.185
11	Banjarejo	55.546
12	Tunjungan	43.239
13	Japah	33.705
14	Ngawen	60.984
15	Kunduran	64.430
16	Todanan	59.660
	J U M L A H	844.490

Sumber : Kantor BPS Kab. Blora, Tahun 2007

Tingkat kepadatan penduduk rata-rata adalah 464 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Cepu sebesar 1.566 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Jiken yaitu 223 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadi pemusatan/konsentrasi penduduk di perkotaan sehingga dalam hal ini perlu adanya penyebaran/distribusi

penduduk pada kecamatan-kecamatan dengan tingkat penduduk rendah dibarengi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana perkotaan, lahan pemukiman baru, pemekaran lahan untuk industri baru.

Gambar 1.1. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2006



Jenis pekerjaan yang terbesar di Kabupaten Blora adalah sektor pertanian. Hal ini terkait dari besarnya tenaga kerja yang bekerja di usaha pertanian, besarnya tenaga kerja yang bekerja khususnya di sektor ini kemungkinan karena rendahnya tingkat pendidikan. Untuk mengatasi perluasan lapangan pekerjaan diupayakan dengan jalan melalui pemberian pelatihan, kursus, pembinaan usaha mandiri, peningkatan usaha ekonomi lemah, pembinaan sektor informal dan pengembangan bisnis.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan harapan hidup. Sehingga sasaran pembangunan diarahkan untuk menurunkan jumlah kematian bayi, ibu hamil, peningkatan harapan hidup serta status gizi masyarakat.

Fasilitas kesehatan mempunyai peranan yang sentral dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan yang meliputi fasilitas Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik KB atau Posyandu sudah memadai. Bahkan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu ternyata sudah ada pada tiap-tiap Kecamatan.

Tabel 1.2. Banyaknya Prasarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2006

No.	Jenis	Jumlah
1	RSUD	2
2	RSU Swasta	2
3	Puskesmas	26
4	Puskesmas Pembantu	55
5	Polindes	29
6	Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)	69
7	BP/RB	24

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Tahun 2007

Tenaga medis yang meliputi tenaga dokter, dokter gigi, tenaga paramedis yang terdiri dari bidan, perawat dan dukun bayi terlatih masih banyak mengalami kekurangan. Sehingga perlu peningkatan jumlah tenaga di bidang kesehatan dan peningkatan ketrampilan tenaga di bidang kesehatan. Kebutuhan tenaga kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Tenaga Kesehatan/Medis

No.	Tenaga Kesehatan	Kondisi yang ada	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Sarjana Kesehatan			
	a. Spesialis	15	18	3
	b. Umum	19	32	13
	c. Gigi	3	16	13
	d. Apoteker	2	3	1
	e. Sarjana Kes. Lain	16	26	10
2.	Sarjana Muda Kes.			
	a. D3 Gizi	5	26	16
	b. D3 AKL	6	26	12
	c. D3 Analisis	4	16	12
	d. D3 Akper	49	64	15
	e. D3 Bidan PNS	24	26	2
	f. D3 Bidan PTT	7	-	-
3.	Sekolah Kesehatan			
	a. Perawat Umum	70	96	26
	b. Perawat Gigi	12	26	14
	c. Bidan PNS	80	295	152
	d. Bidan PTT	63	-	-
	e. SPPH	8	-	-
	f. Asisten Apoteker	6	26	20

*Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bora Tahun 2007*

---

---

	g. SPAG	5	-	-
--	---------	---	---	---

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bora, Tahun 2007

Meskipun sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan bagi pelayanan masyarakat di Kabupaten Bora relatif telah merata di setiap Kecamatan, namun masih banyak dijumpai penderita diare, penyakit kulit dan ISPA. Jumlah penderita diare pada tahun 2007 sebanyak 16.778 orang. Sedangkan penderita ISPA 26.960 orang dan jumlah penderita penyakit kulit sebanyak 5.214 orang. Yang perlu diketahui bahwa biarpun sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bora telah cukup memadai ternyata kesehatan penduduk masih relatif rendah.

Belum semua penduduk mempunyai saluran pembuangan air limbah hampir merata di semua Kecamatan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya Poliklinik Desa dan memberikan kesadaran akan kesehatan lingkungan. Upaya penyuluhan kesehatan masyarakat perlu terus dilakukan guna mengarah pada perubahan perilaku hidup sehat.



## **BAB II**

### **ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA**

Bertambahnya jumlah penduduk sebagai akibat dari pertumbuhan pembangunan yang pesat menyebabkan kebutuhan penduduk untuk meningkatkan standar kesejahteraan hidupnya semakin bertambah secara kualitas dan kuantitas. Hal ini mendorong terjadinya eksploitasi penduduk terhadap lingkungan semakin besar yang pada akhirnya kegiatan tersebut secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan.

Beberapa hal yang menjadi isu utama yang mempengaruhi dalam perubahan lingkungan hidup di Kabupaten Blora adalah :

1. Kekeringan, kekurangan air dalam musim kemarau, sehingga hal ini merupakan hambatan untuk pengembangan pertanian, domestik, industri dan jasa.
2. Lahan kritis, lahan rusak tidak produktif yang disebabkan kerusakan hutan oleh karena penjarahan dan tebang habis.
3. Degradasi, erosi dan tanah longsor akibat konversi hutan menjadi tanaman budidaya pertanian.
4. Kerusakan lahan akibat pertambangan, penambangan bahan galian golongan C tidak terkendali.
5. Pencemaran air sungai akibat limbah industri di daerah hulu dan limbah domestik.
6. Kemiskinan di wilayah sekitar hutan karena keterbatasan sumber daya lahan dalam hal potensi lahan.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap taat hutan dan partisipasi terhadap kelestarian lingkungan.

Secara garis besar isu lingkungan hidup di Kabupaten Blora terbagi menjadi dua yaitu lahan/hutan kritis dan krisis air.

#### **I. HUTAN**

Akibat penjarahan hutan yang terjadi sejak awal tahun 1998, kawasan hutan di Kabupaten Blora yang rusak pada tahun 2003 mencapai 17.824,48 Ha. Hal ini mempengaruhi sediaan air tanah yang hilang 75 juta m<sup>3</sup>/tahun serta berkurangnya daya dukung alam terhadap lingkungan. Penjarahan hutan jati di wilayah Kabupaten Blora sangat mengganggu kelestarian hutan. Kerugian hutan gundul juga akan dirasakan oleh daerah-daerah tetangga yang berdekatan dengan DAS Jratun Seluna seperti Grobogan, Demak, Kudus, Rembang dan Jepara. Selain itu dampak dirasakan juga oleh daerah-daerah yang berdekatan dengan DAS Bengawan Solo seperti Bojonegoro, Ngawi dan Lamongan.

Bila berdasar tata ruang dan tata guna lahannya, total luas Kabupaten Blora mencapai 182.059 hektar. Sebagian besar berupa hutan yaitu 90.416 hektar, sawah 46.208 hektar dan tanah lainlain 45.433 hektar. Dengan luas hutan yang mencapai 90.416 hektar, yang hampir separuh dari luas total wilayah Kabupaten Blora, sebagian besar merupakan hutan Negara dan ditanami kayu jati kualitas terbaik yang dikelola Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu, Randublatung dan Blora.

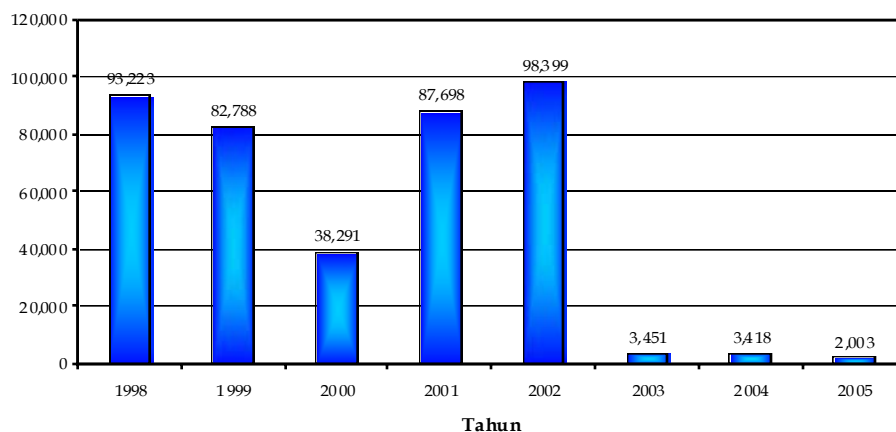
Namun akibat terjadinya aksi penjarahan dan pencurian hasil hutan, terutama yang berlangsung secara besar-besaran sejak tahun 1998 hingga sekarang ini, menyebabkan hutan di Kabupaten Blora porak poranda. Penjarahan dan penggundulan hutan tersebut antara lain mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor dan berimbas kepada penjarahan itu sendiri yang sebagian besar berasal dari penduduk seputar hutan.

Kerusakan hutan Negara itu terjadi sebagai akibat dari kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta kurang pedulinya terhadap lingkungan hutan. Akibat itu semua ternyata kompleks yaitu terjadinya banjir di beberapa wilayah, termasuk juga terjadi kekeringan pada musim kemarau, sehingga banyak lahan pertanian yang tidak bisa dimanfaatkan akibat dari berkurangnya cadangan air tanah.

Hingga bulan Oktober 2005 tercatat ada 2003 batang kayu jati yang dicari

dari kaw asan KPH Randublatung. Jumlah pohon yang dicuri menurun sekitar 41% dari jumlah pencurian tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi penurunan pencurian kayu ini karena masyarakat mulai dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Hal yang mendasar adalah eksistensi mereka diakui dengan w adah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Mereka tak hanya dipandang sebagai masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari keberadaan hutan itu. Masyarakat kini relatif sadar dan menerima manfaat dari pelibatan dalam mengelola hutan.

Gambar 2.1. Jumlah pencurian kayu di Kabupaten Bora



Meski aksi penjarahan sudah mulai terkendali, tapi tampaknya masih terasa hingga sekarang. Pada musim penghujan banyak terjadi musibah banjir dan tanah longsor akibat tangkapan air makin berkurang. Sebaliknya pada musim kemarau terjadi kekeringan berkepanjangan.

Selain pengembangan LMDH, guna mengatasi semakin gundulnya hutan, KPH setempat juga menyelenggarakan reboisasi (penanaman hutan kembali) terhadap lahan hutan yang pernah dijarah dengan sasaran lebih dari 100.000 hektar pada tahun 2005. Namun mengingat proses pertumbuhan pohon jati siap tebang paling cepat 20 tahun, sampai sekarang belum terlihat sejauh mana

keberhasilan program reboisasi tersebut.

Seiring dengan digulirkannya program reboisasi, Perhutani juga menggelar proyek Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang berhasil menekan laju aksi penjarahan, membuka lapangan kerja baru sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi sebagian penduduk sekitar hutan. Lewat PHBM diharapkan bisa menggandeng masyarakat sekitar hutan melakukan kerja sama dengan menanami kembali lahan-lahan gundul akibat penjarahan.

## II. AIR

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini memang air selalu menjadi masalah bagi Kabupaten Blora yang berada di wilayah jajaran pegunungan kapur utara, terutama ketika musim kemarau datang. Sebagian besar di antara 16 kecamatan yang ada di kabupaten ini dilanda kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun kebutuhan untuk mengairi lahan pertanian.

Sementara di musim penghujan, bencana banjir dan tanah longsor, hingga angin ribut selalu menghantui penduduk yang berjumlah lebih dari 850.000 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian.

Berdasarkan topografinya Kabupaten Blora terdiri dari daerah perbukitan dan daerah dataran bergelombang dengan ketinggian 30 – 280 meter dpl. Kecamatan Jiken, Jepon, Blora, Todanan dan Japah berada di atas ketinggian 200 meter dpl. Sementara Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Bogorejo, Tunjungan, Banjarejo, Ngawen dan Kunduran berada di bawah 100 meter dpl.

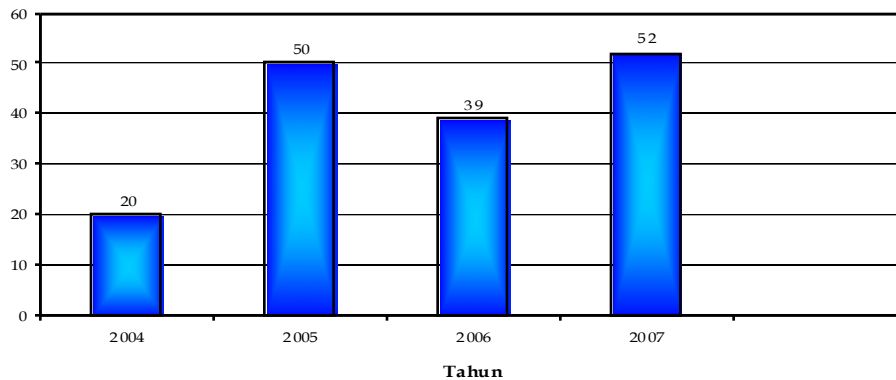
Kekeringan, banjir dan tanah longsor merupakan bencana sepanjang tahun dan terkait satu sama lain. Dalam era otonomi ini, ketiga bencana tersebut cenderung meningkat, oleh karena itu penanganannya harus merupakan kesatuan yang utuh tidak boleh sektoral. Secara umum strategi menghadapi kemarau dapat disebutkan beberapa hal yaitu :

1. Efisiensi penggunaan air dengan pemenuhan kebutuhan air secara efektif, dan sosialisasi gerakan penghematan air.
2. Pengelolaan sumber daya air secara efektif yang ditinjau secara komprehensif dan terpadu terutama berkaitan dengan potensi sumber daya air, kebutuhan, alokasi masing-masing kebutuhan dan skala prioritas.
3. Pemanfaatan simpanan air embung dan waduk secara selektif dan efektif.
4. Penyesuaian pola tanam.
5. Kegiatan yang mendukung kelestarian alam.

Kabupaten Blora dengan intensitas hujan yang cukup rendah dikhawatirkan dapat mengakibatkan kekeringan air. Hal ini disebabkan karena siklus cuaca di bawah batas normal. Dimana pada musim kemarau hampir seluruh wilayah Kabupaten Blora dapat dipastikan mengalami kekurangan air, khususnya air bersih. Beberapa upaya telah dilakukan selain membuat penampungan air hujan seperti embung yang beberapa waktu lalu sudah terealisasi di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Di samping mencegah banjir pada saat musim hujan, embung juga dapat digunakan untuk menyimpan cadangan air dan mencegah kekeringan lahan pertanian pada saat musim kemarau.

Selain upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora juga sudah memasyarakatkan sumur resapan. Fungsi sumur resapan tidak jauh berbeda dengan menampung air melalui situ atau danau buatan serta daerah resapan. Sekecil apapun luas sumur resapan yang dibuat akan sangat membantu menambah persediaan air tanah dangkal walaupun hanya setetes saja. Setidaknya bila ada hujan, airnya tidak langsung mengalir ke selokan dan terus kesungai serta kemudian terbuang ke laut. Bila setiap rumah terdapat sumur resapan, tentu air hujan tersebut tidak terbuang begitu saja. Tetapi bisa menjadi tambahan untuk air dangkal bahkan juga air tanah dalam. Selain untuk sumur resapan, permukaan sumur resapan tersebut juga bisa dipakai untuk penghijauan.

Gambar 2.2 Jumlah Sumur Resapan di Kabupaten Blora



Selain sebagai tabungan air pada musim kemarau, sumur resapan ini sangat efektif untuk mengantisipasi kelebihan air akibat banjir. Selain itu juga merupakan salah satu upaya pencegahan yang tepat sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan air tanah baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.

Daerah perkotaan merupakan daerah yang berpenduduk padat. Lahan yang tertutupi bangunan lebih banyak/luas daripada lahan terbuka. Di samping itu, kebutuhan air tanah untuk keperluan rumah tangga sangat tinggi. Sehubungan dengan perkembangan pemukiman penduduk, peresapan air hujan semakin lama semakin sedikit. Sementara air yang ditarik/diambil ke atas permukaan melalui sumur-sumur atau pompa air semakin banyak dan tidak terkendali. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan permukaan air tanah sehingga kebutuhan air sulit didapat. Sumur resapan di daerah perkotaan sangat dibutuhkan, sebab air yang dibuang pada saat musim hujan sangat banyak jumlahnya, sayang jika tidak dikendalikan atau ditampung sebagai air cadangan pada musim kemarau.

Di sisi lain sebagai akibat pengelolaan yang salah, air bisa menjadi bencana. Kelebihan air bisa menimbulkan banjir. Berdasarkan pemantauan, di sepanjang DAS Bengawan Solo ada beberapa talut yang ambrol. Selain karena pengikisan air sungai, ambrolnya talut diduga karena tidak bisa menahan gerusan air dari penambang pasir bermesin. Air yang dikeluarkan mesin penyedot pasir

dibiarkan membasahi areal sekitar penambangan di bibir sungai. Akibatnya tanah di sekitar lokasi penambangan rentan mengalami longsor.

Masalah kuantitas dan kualitas air harus ditangani bersama secara terpadu dan terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. DAS sebagai sumber daya air untuk kepentingan sumber air minum domestik, irigasi, tenaga listrik, bahkan objek pariwisata harus direncanakan. Perencanaan ini harus terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan oleh Pemerintah, swasta, investor, LSM dan pihak terkait lain. Terintegrasi dan terpadu berarti semua komponen terlibat dan melingkupi semua pihak, harus mengikutsertakan seluruh komponen manusia, alam, institusi dan kemampuan pengelolaannya sesuai dengan teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan.



### **BAB III**

#### **AIR**

Keberadaan sumberdaya air sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup di muka bumi khususnya manusia baik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia maupun untuk kegiatan pembangunan. Kondisi potensi sumberdaya air relatif tetap dari waktu ke waktu, sedangkan jumlah mahluk hidup yang membutuhkan air terutama manusia yang memerlukan air terus bertambah dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya konservasi yang dapat meningkatkan keberadaan air di muka bumi. Potensi sumberdaya air perlu senantiasa dipantau keberadaan dan kuantitasnya.

Berdasarkan pada letak/posisinya sumberdaya air dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Air permukaan
2. Air tanah dangkal
3. Air tanah dalam

Sebagai salah satu sumberdaya alam, keberadaan air di dataran baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan kimia. Dari segi kuantitas, air sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi, keadaan fisik serta penggunaan lahan dari suatu wilayah. Untuk air tanah sendiri, jenis dan ketebalan dari akuifer pada wilayah tersebut dan polaritas tanah, merupakan faktor yang menentukan kualitas air tanah.

Berdasarkan Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. banyaknya hari hujan dan curah hujan selama tahun 2006 relatif baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Banyaknya hari hujan di Kabupaten Bora adalah 80 hari, sedangkan curah hujan adalah 1.427 mm, curah hujan terbesar yaitu di Kecamatan Kedungtuban yakni 1.869 mm, terendah di Kecamatan Tunjungan 1.059 mm. Namun demikian ada enam Kecamatan yang tidak

dapat diketahui jumlah hari hujan maupun curah hujan dikarenakan alatnya rusak. Hal ini mengakibatkan kurangnya validitas data.

*Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007*

Tabel 2.1. Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Blora Tahun 2006

Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
Jati	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Randublatung	26	15	13	10	4	-	-	-	-	-	3	21	92
Kraderan	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Kedungtuban	12	10	7	7	12	1	-	-	2	-	2	11	64
Cepu	6	10	11	9	9	-	-	-	-	-	4	13	62
Sambong	20	15	8	13	11	-	-	-	-	-	4	15	87
Jiken	15	18	10	9	8	2	-	-	1	1	3	7	74
Bogorejo	11	16	14	8	11	1	-	1	-	1	4	12	79
Jepon	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Blora	7	10	11	10	9	-	-	-	-	-	5	12	64
Banjarejo	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Tunjungan	19	16	13	11	12	-	-	-	1	4	2	10	88
Japah	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Ngawen	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Kundurani	16	12	9	11	15	-	-	-	-	5	3	13	84
Todanan	21	17	13	17	12	-	-	-	-	3	5	18	106
Rata-rata 2006	15	14	11	11	10	1	0	1	1	3	4	13	80
Rata-rata 2005	7	11	10	9	1	4	3	2	4	9	6	16	73

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Blora Tahun 2007

Tabel 2.1. Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Blora Tahun 2006

Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
Jati	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Randublatung	438	295	126	228	111	-	-	-	-	-	71	372	1641
Kraderan	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Kedungtuban	363	246	236	289	360	31	-	-	44	-	27	273	1869
Cepu	99	166	140	203	215	-	-	-	-	-	21	222	1066
Sambong	389	210	165	302	181	-	-	-	-	9	16	377	1649
Jiken	250	365	170	125	174	45	-	-	10	10	15	240	1404
Bogorejo	145	265	181	126	216	7	-	11	-	3	33	212	1.199
Jepon	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Blora	101	159	147	214	208	-	-	-	-	-	27	229	1.085
Banjarejo	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Tunjungan	170	254	159	188	146	-	-	-	3	26	21	92	1059
Japah	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

*Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bora Tahun 2007*

---

Ngawen	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
Kunduran	536	361	240	234	268	-	-	-	-	82	53	337	2.111
Todanan	227	277	174	159	142	-	-	-	-	19	29	160	1.187
Rata-rata 2006	272	260	174	207	202	28	0	11	19	25	31	251	1.427
Rata-rata 2005	165	217	222	192	16	103	40	29	39	217	140	348	1.551

Salah satu masalah lingkungan yang timbul dari kegiatan pembangunan adalah pencemaran air sungai sebagai akibat menerima beban pencemar dari limbah yang makin banyak, baik itu limbah dari kegiatan rumah tangga/pemukiman, industri, pariwisata, rumah sakit, maupun pertanian. Sebagian limbah dari berbagai kegiatan tersebut dimasukkan ke sungai sehingga kualitas air sungai menurun.

Hasil analisis kualitas air sungai Bengawan Solo yang diambil pada tanggal 20 Desember 2006 menunjukkan bahwa kadar TDS (1290,00 mg/l), BOD (10 mg/l) dan COD (29 mg/l) melebihi baku mutu berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kelas II yaitu TDS 1000 mg/l, BOD 2 mg/l dan COD 10 mg/l. Sedangkan analisis kualitas air sungai Lusi yang diambil pada tanggal 20 Desember 2006 juga menunjukkan bahwa kadar TDS (1190 mg/l), BOD (7 mg/l) dan COD (24 mg/l) melebihi baku mutu berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas II.

Berdasarkan hasil analisis laboratorium tersebut kegiatan di Kabupaten Bora yang berpotensi sebagai sumber pencemaran diperkirakan berasal dari :

1. Kegiatan Agro Industri dan usaha peternakan di Kabupaten Bora yang meliputi kegiatan :
  - Peternakan Sapi sebanyak 218.575 ekor
  - Peternakan Ayam sebanyak 1.624.337 ekor
2. Kegiatan Industri Pengolahan meliputi : Industri makanan dan minuman
3. Limbah domestik yang merupakan hasil buangan limbah dari penduduk (padat dan cair) yang dibuang ke sungai. Sampah dari limbah domestik mencapai 255m<sup>3</sup>/hari. Berdasarkan data tersebut, pengadaan fasilitas pengangkutan sampah perlu ditingkatkan. Sehingga dapat menjangkau keseluruhan wilayah kota Kecamatan

yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

Usaha untuk mengurangi beban pencemaran yang bersumber dari industri pengolahan telah dilakukan oleh berbagai instansi terkait, penyuluhan dan pemantauan oleh Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Blora.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas bagi pengusaha diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL) dan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL) bagi industri baik industri kecil, menengah maupun besar yang berpotensi sebagai pencemar.

Bagi masyarakat pada umumnya diupayakan menjaga kebersihan lingkungan dan menangani limbah domestik serta kewajiban setiap KK minimal 5-10% dari luas lahan tempat tinggal digunakan untuk resapan air yang dimasukkan dalam Peraturan daerah dalam rangka Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau aturan Kota/Desa setempat berdasarkan konsensus warga setempat. Bagi Pemerintah sendiri melakukan penyuluhan, pemantauan kualitas air melalui Program Kali bersih.

Selain masalah kualitas air yang menurun, Kabupaten Blora juga mengalami masalah kuantitas air. Dengan adanya pertumbuhan industri dan permukiman di Kabupaten Blora menyebabkan eksploitasi pemanfaatan air tanah yang cukup tinggi dan sulit untuk dikontrol dan dikendalikan. Sebagian daerah Kabupaten Blora masih sering terjadi bencana banjir di musim penghujan sehingga dapat mengakibatkan degradasi sumberdaya air.

Kebutuhan air semakin dirasakan cenderung meningkat disaat musim kemarau. Hal ini disebabkan faktor manusia dalam pemakaian air sangat boros sehingga apabila tidak dikendalikan akan terjadi krisis air, disamping itu keterbatasan dan amakapotensi sumberdaya air belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Kabupaten Blora dikenal sebagai wilayah yang memiliki masalah dalam ketersediaan air, terutama pada saat musim kemarau. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan air baik yang diusahakan oleh Pemerintah melalui PDAM (Perusahaan

Daerah Air Minum) maupun yang diusahakan oleh masyarakat sendiri yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar akan air di sepanjang tahun. Wilayah pelayanan PDAM yang belum merata, kapasitas pengelolaan yang belum sesuai kebutuhan, debit air baku yang tidak mencukupi, kontinuitas aliran yang tidak konsisten sampai kualitas air bersih yang belum standar merupakan masalah yang dihadapi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan PDAM yang hanya berada pada delapan kecamatan dari enam belas kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Kualitas air yang diproduksi oleh PDAM masih rendah sehingga kebanyakan konsumen hanya menggunakan untuk air mandi, sedangkan untuk air minum membeli air minum dalam kemasan.

Permasalahan yang ada dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Blora adalah :

1. Belum meratanya pelayanan oleh PDAM

Faktor utama belum meratanya pelayanan PDAM yang dapat dinikmati oleh masyarakat adalah karena keterbatasan kapasitas pengelolaan pada Instalasi Pengolah Air Minum yang dimiliki. Pembangunan instalasi baru membutuhkan investasi yang cukup besar, di samping keterbatasan sumber air yang dijadikan sumber air baku. Jangkauan jaringan yang masih terbatas juga merupakan penyebab belum meratanya penyediaan air bersih terutama bagi daerah-daerah yang berjarak cukup jauh dari Instalasi Pengolah Air Minum.

2. Keterbatasan Sumber Air Baku

Keterbatasan air baku baik air permukaan maupun air tanah merupakan faktor penghambat bagi upaya-upaya peningkatan kapasitas Instalasi Pengolah Air Minum dan air untuk irigasi. Kemungkinan penambahan instalasi baru untuk memperluas wilayah pelayanan juga sangat bergantung pada jumlah air baku yang tersedia. Eksploitasi air tanah yang berlebihan juga merupakan faktor yang mempengaruhi berkurangnya cadangan air tanah yang dapat digunakan sebagai air baku.

Sumber-sumber mata air yang telah dimanfaatkan adalah : Sumber Biting,

Sumber Klampok, Sumber Jepangrejo, Sumber Sukorejo, Sumber Kedungrejo, Sumber, Kedung Bawang, Sumber Kedung Lo, Sumber Jetakw anger, Sumber Sarimulyo, Sumber Kalinanas dan Sumber Krocok. Debit terbesar sumber mata air terdapat di Sumber Klampok yaitu 51 liter/detik, sedangkan debit terkecil adalah Sumber Sukorejo yaitu 16 liter/detik.

Volume penyediaan air di Kabupaten Blora berfluktuasi cukup besar antara musim penghujan dengan musim kemarau. Volume suplai air dari prasarana pengairan existing secara rata-rata pada musim kemarau hanya 44,92% dari volume suplai air pada musim hujan. Sedangkan suplai air sungai pada musim kemarau hanya 29,98% dari volume sungai pada musim penghujan.

Sumber daya air menjadi permasalahan yang terus menerus belum terselesaikan baik untuk memenuhi irigasi atau kebutuhan air bersih/minum. Kondisi ini juga diakibatkan oleh jenis tanah yang kurang memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan menahan air yang masuk ke permukaan tanah. Sumber-sumber mata air yang berasal dari tanah sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan air permukaan perlu digalakan dengan menampung air hujan baik dalam skala kecil untuk rumah tangga (Penampungan Air Hujan / PAH) atau dalam skala lingkungan yang berupa embung, chekdam atau waduk.

Permasalahan sumber daya air adalah :

1. Fluktuasi kuantitas sumber air cukup besar antara bulan basah dan bulan kering
2. Kondisi geologi yang sebagian besar merupakan tanah kapur yang bersifat kurang mampu menahan air dan curah hujan yang termasuk kategori rendah
3. Kekeringan tahunan yang terjadi hampir di semua kecamatan dan desa
4. Keterpaduan pengelolaan sumber daya air

Pembangunan dan pengelolaan sumber daya air sudah diupayakan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan seluruh pengguna, perencana, pembuat kebijakan, lembaga organisasi non pemerintah dan khususnya perempuan pada setiap tingkatan.

Proses seperti ini akan mengakibatkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan diawali dari tingkat yang paling bawah sesuai dengan kebutuhan sehingga setiap pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan air disepakati secara bersama-sama.

Sebenarnya masyarakat dapat berperan aktif untuk mengatasi krisis air, baik dengan melakukan gerakan hemat air, maupun upaya konservasi. Harus ada paradigma baru bahwa eksploitasi air tidak bisa seenaknya lagi. Jika masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya air, masyarakat juga akan menjaga sumber daya air. Konservasi bisa dilakukan dengan mempertahankan daerah hulu sebagai daerah resapan air, tidak mengubah resapan sebagai pemukiman atau industri dan menjaga kebersihan sungai. Upaya konservasi air ini pada akhirnya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas air bersih.

Dewasa ini air tanah maupun air permukaan menjadi permasalahan yang cukup pelik seiring dengan makin langkanya ketersediaan air baik untuk hidup (minum) maupun penyangga kehidupan (irigasi, perindustrian, dan lain-lain). Sebagian besar masyarakat Kabupaten Blora memanfaatkan sumber air bersih yang berasal dari tanah.

Ada beberapa keuntungan mengapa masyarakat kebanyakan menggunakan air tanah, yaitu :

- Kualitas dianggap lebih bagus dibanding air permukaan seperti sungai, khususnya untuk ukuran kejernihan
- Lebih murah biaya operasionalnya
- Cukup membayar listrik untuk pompa air
- Sifatnya *on-site*, artinya dimanapun tanah dengan kemungkinan besar akan didapat sumber air
- Kepraktisan mengurus administrasi, artinya tidak perlu ada daftar tunggu

Hal ini bisa menjadi peluang bagi upaya pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih secara lebih cepat, efisien dan efektif dalam pengalokasian sumber-sumber daya. Namun



demikian seiring dengan perubahan lingkungan dan tekanan kependudukan (bukan sekedar tekanan jumlah penduduk), keberkelanjutan sumber air tanah menjadi menurun baik kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

Upaya pengelolaan air tanah secara teknis maupun non teknis harus dilakukan untuk menjamin kesinambungannya. Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam kerangka konservasi air tanah (Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 1451 K-10-MEM-2000) :

1. Memaksimalkan imbuhan (dengan membuat sumur resapan dan penentuan konservasi untuk kawasan imbuhan – *recharge area*)
2. Pengaturan dan perijinan pengambilan air tanah (memperketat pengeluaran ijin baru untuk pengambilan air tanah. Ijin pengambilan air tanah meliputi : masa berlaku, besarnya debit dan kedalaman sumur, menetapkan pajak/retribusi serta memberi rekomendasi dan saran teknis tentang kedalaman pengambilan air tanah.
3. Perlindungan air tanah (desain tangki septik yang aman dan sehat, pengaturan buangan industri ke tanah)

Upaya di atas masih pada level melengkapi peraturan perundangan dan penyusunan kebijakan. Masih perlu tambahan upaya yang lain seperti program implementasi yang lebih kongkrit, didukung riset yang terarah dan data yang integral dan valid. Selain itu perlu upaya pembelajaran (*education*) pada seluruh *stakeholder*. Perlu dilakukan kampanye-kampanye penyadaran dan persuasif untuk melakukan konservasi air tanah. Bahkan kalau perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (meski tidak harus berwujud dalam mata pelajaran khusus). Hal lain yang dinilai masih kurang adalah upaya penegakan hukum utamanya pelanggaran ijin pengambilan air tanah.

Air tanah tidak bisa terus diandalkan sepenuhnya untuk mendorong pencapaian *Millenium Development Goals* jika tidak ada perubahan yang berarti dalam penanganannya. Sementara jika mengandalkan sistem perpipaan, investasinya terlalu mahal dan laju pertumbuhannya juga kecil. Untuk itu perlu strategi yang tepat tidak hanya sekedar mengandalkan pengawasan dan pembatasan ketat.

Selain itu perlu didorong pendekatan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses kebijakan dan program implementasinya. Pelibatan masyarakat akan memberi ruang pengawasan yang lebih luas dan pembelajaran efektif untuk lebih peduli pada kondisi lingkungan sekitar. Selain itu perlu proses-proses kreatif dalam penciptaan insentif dan desinsentif bagi industri untuk terlibat dalam konservasi lingkungan.

Bagaimanapun juga air merupakan unsur terpenting bagi hidup manusia. Manusia mampu bertahan hidup tanpa makan dalam beberapa minggu, namun tanpa air akan mati dalam beberapa hari. Dalam bidang kehidupan, air juga merupakan hal utama mulai dari budidaya pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik, hingga transportasi. Karenanya air seharusnya diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak dan dijaga terhadap pencemaran. Konservasi sumber-sumber daya, penggunaan air secara efisien dan penyediaan layanan yang berkesinambungan, terjangkau dan diterima bagi setiap orang harus lebih diperhatikan.

Untuk melestarikan sumber daya air di Kabupaten Blora dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan teknologi pengelolaan DAS secara terpadu.

- b. Pengembangan sistem tataguna dan abkasi air bagi berbagai keperluan sektor pembangunan
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ekosistem DAS.
- d. Peningkatan pengelolaan daerah resapan air , pemasyarakatan sumur resapan serta pembuatan embung.
- e. Pelestarian dan Pengembangan Sumber Mata Air.
- f. Reboisasi/ penghijauan.

## **BAB IV**

### **UDARA**

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang segar menjadi kering dan kotor. Bila tidak segera ditanggulangi, perubahan ini dapat membahayakan kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan.

Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar ke dalam udara. Masuknya zat pencemar ke udara dapat terjadi secara ilmiah, misalnya akibat gunung berapi dan kebakaran hutan, dan sebagian besar terjadi karena kegiatan manusia, misalnya sebagai akibat aktivitas transportasi, industri, pembuangan sampah, pembakaran ataupun kegiatan rumah tangga.

Pencemar udara pada dasarnya berbentuk partikel (debu, logam berat) dan gas seperti CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, H<sub>2</sub>S, hidrokarbon, SO<sub>2</sub>. Udara yang tercemar dengan partikel dan gas ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berbeda. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa iritasi pada mata dan kulit ataupun pada paru-paru dan pembuluh darah. Pencemaran udara karena partikel debu dapat menyebabkan penyakit pemapasan kronis seperti bronkitis, asma, kanker paru-paru. Pencemar udara berupa partikel logam berat (timah) dapat mengganggu pembentukan sel darah merah, menyebabkan kerusakan ginjal.

Di Kabupaten Blora, sumber pencemaran udara yang paling utama adalah dari kegiatan transportasi dan pembakaran sampah. Sedangkan untuk kegiatan industri di Kabupaten Blora tidak begitu memberikan beban pencemaran yang besar karena hampir seluruh kegiatan industri di Kabupaten Blora merupakan industri rumah tangga/industri kecil seperti industri tahu dan tempe.

Pencemaran udara akibat kegiatan transportasi yang sangat penting adalah akibat kendaraan bermotor di darat (transportasi darat). Kendaraan bermotor merupakan sumber pencemaran udara yaitu menghasilkan gas CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, hidrokarbon, SO<sub>2</sub> dan logam berat timah (Pb). Kendaraan bermotor sendiri dikelompokkan sebagai sumber pencemar yang bergerak, dengan demikian penyebaran pencemar yang diemisikan dari kendaraan bermotor mempunyai pola yang meluas.

Di Kabupaten Blora jumlah kendaraan bermotor roda dua pada akhir tahun 2006 mencapai 138.040 unit, mengalami kenaikan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 111.959 unit. Sedangkan untuk kendaraan roda empat (baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum) pada akhir tahun 2006 sebanyak 1.226 unit, mengalami kenaikan dari 9.510 unit pada tahun 2005.

Tabel 4.1. Banyaknya Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora

Jenis Kendaraan	2004	2005	2006
Mobil Penumpang	3.440	4.111	4.371
Mobil Beban	4.059	4.388	4.625
Mobil Bus	525	510	514
Sepeda Motor	94.762	111.959	138.040
Jumlah	102.786	120.968	147.550

Sumber : Polres/Samsat Kabupaten Blora, Tahun 2006

Kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Blora masih berorientasi pada peningkatan kelancaran mobilitas manusia, barang dan jasa serta dikembangkan jangkauannya hingga ke pebsok desa. Kebijakan pembangunan transportasi belum menjangkau pada pembatasan jumlah kendaraan pada suatu wilayah tertentu, mengingat beban pencemaran udara mempunyai korelasi positif dengan jumlah kendaraan, luas wilayah jaringan transportasi yang menjadi kesatuan dengan pemukiman serta faktor iklim.

Penghijauan turus jalan sebagai upaya pendaauran gas untuk asimilasi tumbuhan sehingga diharapkan dapat mengurangi besarnya kadar CO<sub>2</sub>, pemasyarakatan hutan kota, larangan penggunaan bensin yang mempunyai kadar timbal tinggi dan pelarangan penggunaan solar berkadar belerang tinggi serta ujienisi kendaraan secara kontinyu terus dilakukan. Selain itu juga dilakukan penanaman tanaman-tanaman yang dapat menyerap logam-logam berat pencemar udara di sepanjang jalan seperti sanseiviera. Bahkan telah dicanangkan Kabupaten Blora sebagai Kota Sanseiviera. Hal ini sebagai salah satu upaya agar masyarakat Kabupaten Blora turut mengurangi pencemaran udara dan menjaga agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

**BAB V**

**LAHAN DAN HUTAN**

**A. PENGGUNAAN LAHAN**

**1. Luas Wilayah Penggunaan Lahan Utama**

Kabupaten Bora memiliki luas wilayah 182.058,797 ha. Namun dari tahun ke tahun, luas wilayah Kabupaten Bora belum mengalami perubahan yang berarti.

Secara rinci penggunaan lahan di Kabupaten Bora disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 5.1

Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Bora (Ha)

Penggunaan Lahan	Tahun 2005	Tahun 2006	Perubahan	(%)
Bangunan/Pekarangan	16.747,397	16.790,585	43,188	0,26
Sawah	46.143,958	46.126,509	- 17,449	- 0,037
Tegalan	26.285,926	26.276,229	- 9,74	- 0,037
Hutan Negara	90.416,520	90.416,520	0	0
Perkebunan rakyat	4,000	4,000	0	0
Waduk	56,962	56,962	0	0
Tanah lainnya	2.381,259	2.381,869	0,610	0,026
Jumlah	182.058,797	182.058,797	0	0

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bora, Tahun 2006

Perubahan penting dalam peruntukan lahan yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di Kabupaten Bora yaitu :

- a. Areal bangunan/pekarangan mengalami penambahan sebesar 43.188ha.
- b. Penurunan lahan sawah sebesar 17.449 ha.

c. Penurunan lahan tegalan sebesar 9.74 ha.



Penyebab utama bertambahnya areal pemukiman adalah penambahan penduduk yang sudah barang tentu membutuhkan tempat tinggal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya konversi penggunaan lahan dari tanah pertanian ke non pertanian, termasuk di dalamnya untuk kepentingan Industri.

Kabupaten Blora, terdapat lahan yang perlu direhabilitasi atau direklamasi, yaitu lahan bekas penambangan bahan galian golongan C yang tidak dimanfaatkan. Upaya rehabilitasi lahan ini perlu dilaksanakan, karena dalam jangka panjang keberhasilan program rehabilitasi, reklamasi lahan maupun remediasi lahan akan sangat membantu kebijakan Industrialisasi dalam hal penyediaan lahan dan pencetakan lahan-lahan produktif.

Penggunaan lahan paling besar di Kabupaten Blora adalah Hutan 90.416,520 ha (49,66%). Peruntukan lahan lainnya yang cukup luas juga adalah saw ah 46.126,509 ha (25,34%), tegalan 26.276,229 ha (14,43%) dan sisanya dipergunakan untuk bangunan/pekarangan, w aduk, perkebunan rakyat dan lain-lain penggunaan.

Dalam total luas wilayah di Kabupaten Blora, Kecamatan Randublatung merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas diantara 15 Kecamatan di Kabupaten Blora, yakni 211.13 Km<sup>2</sup> dan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Cepu yakni 49.15 Km<sup>2</sup>.

Luas lahan pertanian di Kabupaten Blora berupa saw ah 46.129.509 ha dan lahan kering atau lahan bukan saw ah 135.928.876 ha. Saw ah dengan pengairan teknis di Kabupaten Blora sebesar 7.449 ha, pengairan setengah teknis 967 ha, pengairan sederhana 4.114 ha, pengairan non PU 1.640 ha, saw ah tadah hujan 29.703.921 ha dan P2AT 2.256 ha dari seluruh luas lahan saw ah di kabupaten Blora. Lahan saw ah menurut jenis pengairan dibedakan sebagai berikut :

Tabel 5.2.

Luas Lahan saw ah dirinci menurut pengairan

No.	JENIS PENGAIRAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Teknis	7.449,000	16,15
2	Setengah Teknis	967,000	2,10
3	Pengairan Sederhana	4.114,000	8,92
4	Pengairan Desa/ Non PU	1.640,000	3,56
5	Tadah Hujan	29.703,921	64,39
6	P2A T	2.256,000	4,89
	Jumlah	46.126,921	100,00

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Tahun 2006

Seperti terlihat dari Tabel 5.2. saw ah tadah hujan di Kabupaten Blora cukup luas yakni 29.703,921 ha. Selain lahan sawah, Kabupaten Blora memiliki lahan kering yang lebih luas dari lahan sawah yakni 135.928,876ha. Hal ini disebabkan antara lain karena faktor alam, yakni bahwa Kabupaten Blora tidak seluruhnya berupa dataran rendah tetapi juga berbukit-bukit. Didaerah seperti ini cukup banyak dijumpai lahan kering. Pemanfaatan lahan kering di Kabupaten Blora dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Tabel 5.3.

Luas lahan Kering dirinci menurut peruntukannya

No	JENIS PERUNTUKAN	LAHAN (Ha)	PERSENTASE
1	Pekarangan	16.90,585	12,3525
2	Tegalan	26.279,229	19,3330
3	Waduk	56,962	0,0419
4	Hutan Negara	90.416,520	66,5174
5	Perkebunan Rakyat	4,000	0,0029
6	Tanah lainnya	2.381,869	1,7523
	JUMLAH	135.914,839	100,0000

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Tahun 2006

Dari Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa hutan merupakan lahan terluas yakni 90.416,520 ha dari penggunaan lahan kering. Kemudian disusul tegalan yakni 26.279,229 Ha. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten

Blora hidup dari sektor kehutanan dan pertanian.

Komoditi yang ikut menopang perekonomian Kabupaten Blora merupakan hasil kehutanan dan pertanian lahan kering meliputi kayu, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, palawija dan tanaman hortikultura lainnya.

Lahan kering ternyata masih mempunyai potensi untuk dikonversi menjadi lahan sawah, terutama lahan kering dataran rendah. Hal ini dapat terlaksana apabila lahan kering tersebut dapat dijangkau pengairan dengan memanfaatkan fungsi sungai secara optimal dengan membangun bendungan-bendungan baru.

Pada umumnya kesuburan lahan kering itu rendah, ini berarti lahan kering tersebut membutuhkan pengairan secepatnya agar para petani dapat mengkonversi lahan kering menjadi lahan sawah.

Dengan luas tegalan yang ada di Kabupaten Blora masih dimungkinkan penciptaan sawah-sawah baru, namun butuh dukungan penciptaan irigasi. Disamping melalui pemupukan, kesuburan tanah dapat terbina melalui irigasi yang membawa lumpur dan unsur hara lainnya.

Pada musim kemarau pada umumnya di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Blora mengalami kekeringan. Dampak lingkungan yang diakibatkan kekeringan adalah berkurangnya persediaan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan domestik penduduk sehingga hasil panen dan produktivitas padi/palawija menurun, menyusutnya produksi ikan dan menyusutnya air untuk kebutuhan hidup manusia.

Berbagai upaya pengelolaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain : Pencarian sumber-sumber air, Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH), Penerapan program gerakan hemat air, penanaman tanaman

dengan memilih jenis tanaman pertanian yang disesuaikan dengan perilaku musim, memperbaiki penyediaan air seperti pembangunan waduk, embung, kolam dan penerapan teknologi hujan buatan.

Penanganan lingkungan hidup juga terus ditingkatkan dengan dalam upaya mengurangi lahan-lahan kritis baik yang terletak di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Ditinjau Perubahannya Selama Satu Tahun.

Penggunaan lahan di suatu wilayah selalu berubah-ubah, tidak terkecuali lahan di Kabupaten Blora. Penggunaan lahan pada tahun tertentu bertambah luas atau terjadi sebaliknya yakni berkurang. Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya biasanya selalu bertambah luas, sejalan dengan pertambahan penduduk yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan biasanya lahan pertanian biasanya bergerak mundur atau terus mengalami pengurangan. Penggunaan lahan untuk Kabupaten Blora dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami banyak perubahan.

3. Penggunaan dan Status Pemilikan Lahan

Data penguasaan lahan sangat penting untuk diketahui karena hal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembebasan lahan, menyusun kebijakan peruntukan dan pembinaan lahan daerah tersebut.

Masalah pemilikan lahan dalam hal ini menyangkut beberapa aspek yakni pemilikan lahan di wilayah Kabupaten Blora rata-rata per petani dari pemilikan yang layak bagi usaha tani, standar minimal adalah 2 ha per petani.

Rata-rata lahan pertanian yang ada hanya mencapai 0,2 ha per petani di Kabupaten Blora, secara umum memang disebabkan dua hal yang satu

sama yang lain saling terkait, yaitu :

- Pertambahan penduduk yang mengakibatkan tekanan penduduk bertambah karena diikuti kebutuhan lahan.
- Pemecahan bidang lahan karena kebutuhan biaya hidup maupun warisan yang membagi lahan.
- Masih banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang sampai saat ini belum didaftar.

- Masih dijumpai adanya pemilik tanah namun tidak mengetahui dengan jelas batas lahan yang dimilikinya dan bahkan ada sebagian kecil yang tidak mengetahui letak tepat tanahnya.
- Masih banyak adanya sebidang tanah yang diakui dimiliki oleh lebih dari satu pihak baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah : misalnya tanah timbul, disatu pihak pemerintah (kehutanan) mengklaim wilayah kehutanan dilain pihak masyarakat menyatakan tanah negara yang dapat diajukan menjadi tanah milik.

## B. SUMBERDAYA HUTAN

### 1. Luas Hutan

Luas penggunaan hutan di wilayah Kabupaten Blora Tahun 2006 adalah seluas 90.416,520 ha yang terdiri dari Hutan Wisata, Hutan Lindung, Hutan Produksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kehutanan, ditetapkan bahwa 30% dari luas suatu wilayah harus berupa hutan.

Bagi Kabupaten Blora persyaratan tersebut tidak menjadi masalah mengingat sampai saat ini luas hutan mencapai 49,66% dan luas hutan di Kabupaten Blora itu harus tetap dipertahankan dengan mempertahankan kawasan hutan yang sudah ada. Selain itu juga dikembangkan jumlah hutan rakyat melalui program-program seperti usaha reboisasi dan penghijauan disetiap jengkal tanah kosong, pengelolaan lahan kritis dan lahan lain yang berpotensi untuk dapat dilakukan penghijauan.

Keberhasilan program penanaman sejuta pohon yang dilakukan di Kabupaten Blora pada beberapa waktu yang lalu ternyata telah memacu masyarakat Kabupaten Blora untuk melakukan penghijauan dan sambutan masyarakat Kabupaten Blora terhadap usaha penghijauan masih perlu ditingkatkan serta diarahkan agar sasarnya lebih realistis. Untuk

kepentingan tersebut kiranya masih diperlukan pendataan kembali lahan-lahan yang berpotensi untuk daerah penghijauan. Di Kabupaten Blora pelaksanaan reboisasi dilaksanakan diberbagai Kecamatan yang sesuai serta cocok untuk penghijauan.

## 2. Fungsi Hutan

Pengelompokan hutan berdasarkan fungsinya memiliki landasan hukum yang kuat. Pengelompokan disusun berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah yang mengacu kepada azas kelestarian dan keseimbangan ekosistem serta pengelolaan sumberdaya alam secara nasional dengan memperhatikan karakteristiknya.

Perubahan luas hutan dan jenis ragam vegetasinya sangat berpengaruh terhadap keberadaan/potensi air tanah, keseimbangan CO<sub>2</sub> dan O<sub>2</sub> di udara dan terganggunya satwa liar di sekitar hutan.

Sumberdaya yang telah ada merupakan kekayaan alam Kabupaten Blora, yang memberikan sumbangan yang berarti. Pembinaan hutan mutlak diperlukan agar adanya perubahan-perubahan, kerusakan-kerusakan dapat diketahui sejak dini sehingga tindakan-tindakan preventif dapat dilakukan demi kelestarian hutan tersebut.

## 3. Nilai Hutan

Peranan sumberdaya hutan di dalam lingkup pembangunan nasional dapat dipandang sebagai produsen yang menghasilkan berbagai produk dalam bentuk barang dan jasa. Sebagai produsen, hutan merupakan sumber komoditi kayu, komoditi getah dan komoditi satwa (flora dan fauna).

Dilihat dari segi aspek jasa, hutan merupakan sarana pendukung lingkungan hidup, yaitu dalam bentuk :

- Pengaturan tata air tanah

- Perlindungan lahan, pencegahan erosi dan banjir
- Pemeliharaan kesuburan tanah
- Pengatur iklim mikro
- Sumber plasma nutfah (nabati dan hewani)
- Keindahan alam, pariwisata, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan kebudayaan
- Produsen oksigen
- Manfaat yang berguna berupa : kesempatan kerja dan berusaha

Hutan di Kabupaten Blora tidak terlepas dari penebangan liar dan penjarahan, pencurian perseorangan serta diwujudkan juga dengan perubahan lahan tersebut menjadi permukiman dan kawasan industri. Kawasan tersebut dapat terjadi di wilayah Kecamatan Blora, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Todanan dan hampir semua kawasan hutan dijarah.

Akibat yang akan terjadi adalah perubahan ekosistem yang berpengaruh terhadap keseimbangan flora dan fauna serta faktor Fisik Kimia/iklim mikro seperti peningkatan suhu, retensi tanah, kelembaban, erosi dan meningkatnya lahan kritis, serta daur keseimbangan air, habitat satwa menjadi terganggu, produksi kayu menurun, sedimentasi sepanjang sungai dan muara dan peningkatan banjir.

Hutan yang ada sekarang ini sudah tak dapat lagi menjadi sumber devisa negara. Apalagi 43 juta ha hutan nasional dalam keadaan rusak, di Kabupaten Blora lahan hutan bertambah tetapi kecenderungan tingkat kerusakan dan degradasi hutan sudah luar biasa parah sedangkan produksi kayu dari tebang rutin tidak mampu menutup melonjaknya kebutuhan bahan baku kayu.

Langkah yang paling baik yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini dengan pengelolaan hutan secara profesional, terarah, terencana



dan terpadu. Dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penghijauan dan perbaikan sistem penataan tanah hutan. Menerapkan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (F-BM), Sosial Forestry (Perhutanan Sosial). Membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan dan lahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan penataan penyelesaian konflik pemilikan lahan.

## **BAB VI**

### **KEANEKARAGAMAN HAYATI**

Walaupun jumlah keanekaragaman hayati begitu banyak namun populasi tiap jenisnya rendah, sehingga perlu sekali dijaga kelestariannya. Penjagaan kelestarian hayati memerlukan perhatian dan biaya yang besar, sehingga perlu memprioritaskan jenis-jenis yang rawan punah, seperti jenis populasi yang rendah, endemik, pemangsa puncak, jenis yang dimanfaatkan besar-besaran, dan hewan yang hanya hidup di tengah hutan rimba.

Pengamatan keanekaragaman hayati di Kabupaten Blora dari tahun ke tahun terdapat penurunan dalam hal jenis maupun populasinya. Jenis flora jelas mengalami penurunan terutama di kawasan hutan alami maupun hutan produksi, dan ini mempengaruhi ekosistem hutan sehingga berpengaruh pula pada kondisi fauna.

#### 1. Kondisi Flora di Kabupaten Blora

Hutan di Kabupaten Blora tidak terlepas dari penjarahan dan penebangan liar (pencurian perseorangan), dapat berupa perubahan lahan perkebunan menjadi permukiman atau kawasan industri.

Setiap perubahan ekosistem selalu berpengaruh terhadap keseimbangan flora dan fauna, serta faktor fisik seperti peningkatan suhu, retensi tanah, erosi dan meningkatnya lahan kritis.

Upaya menjaga kelestarian flora sudah banyak dilakukan dengan koordinasi antar instansi terkait, namun hasilnya belum memuaskan. Terdapatnya kawasan konservasi dan cagar alam di Kabupaten Blora sudah cukup memadai namun petugas di lapangan kurang sehingga dalam pengawasan masih rendah. Selain itu kesadaran masyarakat masih kurang baik masyarakat ekonomi lemah (di sekitar hutan) maupun masyarakat

ekonomi tinggi (kalangan pengusaha). Akhir-akhir ini digalakkan program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat di sekitar hutan dalam menjaga dan memelihara hutan sambil bertani.

2. Kondisi Fauna di Kabupaten Blora

Perdagangan satwa langka yang dilindungi di Indonesia masih terus berjalan. Satwa langka yang dilindungi jauh lebih banyak daripada tumbuhan. Hasil pengamatan langsung yang dapat dicatat : burung merak, jalak putih, rangkok, kuntul, blekok jawa, bido, kipas biru, gelatik, kepodang, betet, reptil juga diperjualbelikan, misal biawak (menyawak), kura-kura (bulus).

Upaya penanggulangan untuk konservasi sumberdaya hayati sudah dilakukan melalui operasi terhadap penjual satwa langka di kawasan konservasi. Penanggulangan ini masih belum efektif untuk menjaga keanekaragaman hayati jenis terutama satwa, karena banyaknya masyarakat yang berusaha menangkap dan memelihara dalam sangkar sehingga reproduksinya terputus.

Selain itu kesadaran masyarakat untuk mengembalikan satwa ke habitatnya masih sangat rendah. Kalau ini berlangsung terus maka jumlah jenis satwa yang punah akan meningkat, seperti elang jawa yang sulit sekali dijumpai di habitatnya.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI/TINDAK LANJUT**

#### **1. Air**

- a. Pelestarian dan Pengembangan Sumber Mata Air Berbasis Masyarakat perlu terus digalakkan dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap terjaga.
- b. Peningkatan Penghijauan di daerah tangkapan air (*catchment area*) sebagai upaya konservasi sehingga sumber daya air tetap terjaga kelestariannya.
- c. Pengembangan irigasi dengan memanfaatkan secara optimal air permukaan yang ada untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau.
- d. Peningkatan Pemasarakatan Sumur Resapan untuk mengatasi kekurangan air bersih baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.
- e. Pemanfaatan Air Tanah secara optimal dengan tetap memperhatikan kaidah konservasi. Untuk itu perlu pengawasan ABT agar kerusakan *aquifer* dan penurunan tanah dapat diminimalkan.

#### **2. Udara**

- a. penghijauan turus jalan perlu ditingkatkan untuk mengendalikan pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak.
- b. pemsarakatan hutan kota untuk meminimalisasi pencemaran udara di kawasan perkotaan.
- c. uji emisi kendaraan secara kontinyu
- d. pelarangan secara tegas penggunaan bensin dengan kadar timbal tinggi dan penggunaan solar dengan kadar belerang tinggi

#### **3. Lahan dan Hutan**

- a. Pemanfaatan lahan secara terencana dan terkendali untuk keseimbangan kepentingan berbagai sektor.
- b. Bentuk perubahan tata guna lahan menuju pada pola keseimbangan lingkungan. Lahan produktif supaya dipertahankan semaksimal mungkin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- c. Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat setempat dalam rangka pembinaan dan rehabilitasi kritis.
- d. Untuk mengendalikan peningkatan luasan lahan kritis dapat dilakukan secara teknis maupun non teknis. Secara teknis, kegiatan-kegiatan pengendalian dapat berupa reklamasi kerusakan lahan melalui penghijauan dan penataan sistem terasering. Pendekatan non teknis dapat berupa kegiatan penyuluhan dan atau pelaksanaan kegiatan yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat.
- e. Penerapan bioremediasi bagi lahan yang tercemar logam berat dengan mikroba dan tanaman yang dapat menyerap unsur logam.
- f. Penertiban perijinan untuk para penambang liar, agar lingkungan hidup yang ada dapat terjaga kelestariannya.
- g. Untuk menjaga kelestarian hutan (negara dan rakyat), berbagai upaya telah dilakukan seperti pembuatan hutan rakyat, *argoforestry*, pembuatan dam penahan dan sumur resapan perlu ditingkatkan baik cakupan wilayah maupun kualitasnya. Di sisi lain pengembangan usaha perhutanan rakyat perlu terus dilakukan agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan produktivitas (manfaat ekonomi) dan kelestarian fungsi ekologisnya sehingga penyelamatan hutan berbasis masyarakat dapat dikembangkan. Disiplin petugas kehutanan terus ditingkatkan. Penerapan hukum yang berat bagi pencuri kayu hutan.
- h. Perlu ditingkatkan pengembangan usaha hutan rakyat untuk meningkatkan peran serta masyarakat setempat secara menguntungkan dalam memelihara dan menjaga kelestariannya.

- i. Perlu peningkatan program penyelamatan hutan, utamanya pelaksanaan pengamanan hutan terpadu dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan instansi terkait dengan sumber daya hutan secara terkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

**4. Keanekaragaman Hayati**

- a. Peningkatan rehabilitasi hutan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.
- b. Upaya penangkaran tanaman dan hewan khas sebagai upaya mencari identitas daerah perlu diteruskan dengan cara menyediakan pos secara berkelanjutan dalam APBD, sehingga kepunahan flora dan fauna langka dapat dihindarkan.
- c. Membuat kebijakan untuk menindak dengan tegas setiap orang yang ketahuan merusak lingkungan dan habitat yang ada di dalamnya.
- d. Membatasi penggunaan senapan angin demi kelestarian flora dan fauna.
- e. Membuat kebijakan untuk menindak dengan tegas setiap orang yang ketahuan menangkap maupun yang memperjualbelikan satwa-satwa yang dilindungi.